



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G / 64 / B.05 / HK / 2017

ABOUT

GRANTING AUTHORITY OF BUDGET USER (KPA), OFFICIAL MAKING COMMITMENT (PPK), OFFICIAL SIGNING GOVERNMENT ORDER TO PAY (PPSPM), HEAD OF EXPENDITURE OF BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE STATE (APBN)/DECONCENTRATION IN THE FIELD OF COOPERATION, SMALL BUSINESS AND MIDDLE PROVINCE LAMPUNG YEAR 2017 BUDGET

GOVERNOR LAMPUNG,

- Memorandum :** Letter from the Director of Cooperation, Small Business and Middle Province Lampung Number : 188/V.15/Sek.1/III/2017 dated 06 March 2017
Subject: Management of Program/Activity APBN TA. 2017;
- Consideration :**
- that in the framework of administrative order, smooth implementation and management of activities that are sourced from Budget Revenue and Expenditure State (APBN)/Decentralization Year Budget 2017 in the Field of Cooperation, Small Business and Middle Province Lampung, need to grant Authority of Budget User (KPA), Official Making Commitment (PPK), Official Signing Government Order to Pay (PPSPM), and Head of Expenditure of Budget Revenue and Expenditure State (APBN)/Decentralization that are responsible well from the physical aspect as well as efficiency and effectiveness of activities intended in accordance with Document of Implementation of Budget (DIPA), Work Plan and Budget Ministry/Institution (RKA-KL) that are concerned;
 - that the Official/Employee Civil Servant whose Name, Rank/Grade, and NIP as stated in the Attachment of this Decision are considered capable and meet the requirements to be appointed/promoted as Authority of Budget User (KPA), Official Making Commitment (PPK), Official Signing Government Order to Pay (PPSPM), and Head of Expenditure of Budget Revenue and Expenditure State (APBN)/Decentralization Year Budget 2017;
 - that in connection with the meaning of letter a and letter b above, so that its implementation can run smoothly need to appoint/promote Authority of Budget User (KPA), Official Making Commitment (PPK), Official Signing Government Order to Pay (PPSPM), and Head of Expenditure of Budget Revenue and Expenditure State (APBN)/Decentralization in the Field of Cooperation, Small Business and Middle Province Lampung Year Budget 2017 and to set it with the Decision of Governor Lampung;
- Remember :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :
- a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan Kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Pembayaran;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- KEEMPAT : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang :
- a. menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Pembayaran beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan Surat Perintah Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KEENAM : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 10 Februari 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 3 - 2017

GOVERNUR LAMPUNG,

M. RIHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/164/B.05/HK/2017
 TANGGAL : 31 - 3 - 2017

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-044.01.3.120010/2017 07-12-2016	(044) (01) (12) (120010)		2.286.040.000,-	Satria Alam, SE, M.Si NIP. 19610307 199803 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
1.1	SP DIPA-044.01.3.120010/2017 07-12-2016	044.01.06.	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	2.286.040.000,-	Satria Alam, SE, M.Si NIP. 19610307 199803 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	A. Zarkasi, SE, MM NIP. 19660830 199603 1 003 Pembina (IV/a)	DR. Agus Nompitu, SE, M.TP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina TK. I (IV/b)	Fillia Tri Andriani, A.Md NIP. 19880503 201001 2 006 Pengatur Tk. I (II/d)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-044.01.3.120010/2017 07-12-2016	044.01.06. 2726	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	2.286.040.000,-	Satria Alam, SE, M.Si NIP. 19610307 199803 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	A. Zarkasi, SE, MM NIP. 19660830 199603 1 003 Pembina (IV/a)	DR. Agus Nompitu, SE, M.TP NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina TK. I (IV/b)	Fillia Tri Andriani, A.Md NIP. 19880503 201001 2 006 Pengatur Tk. I (II/d)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO